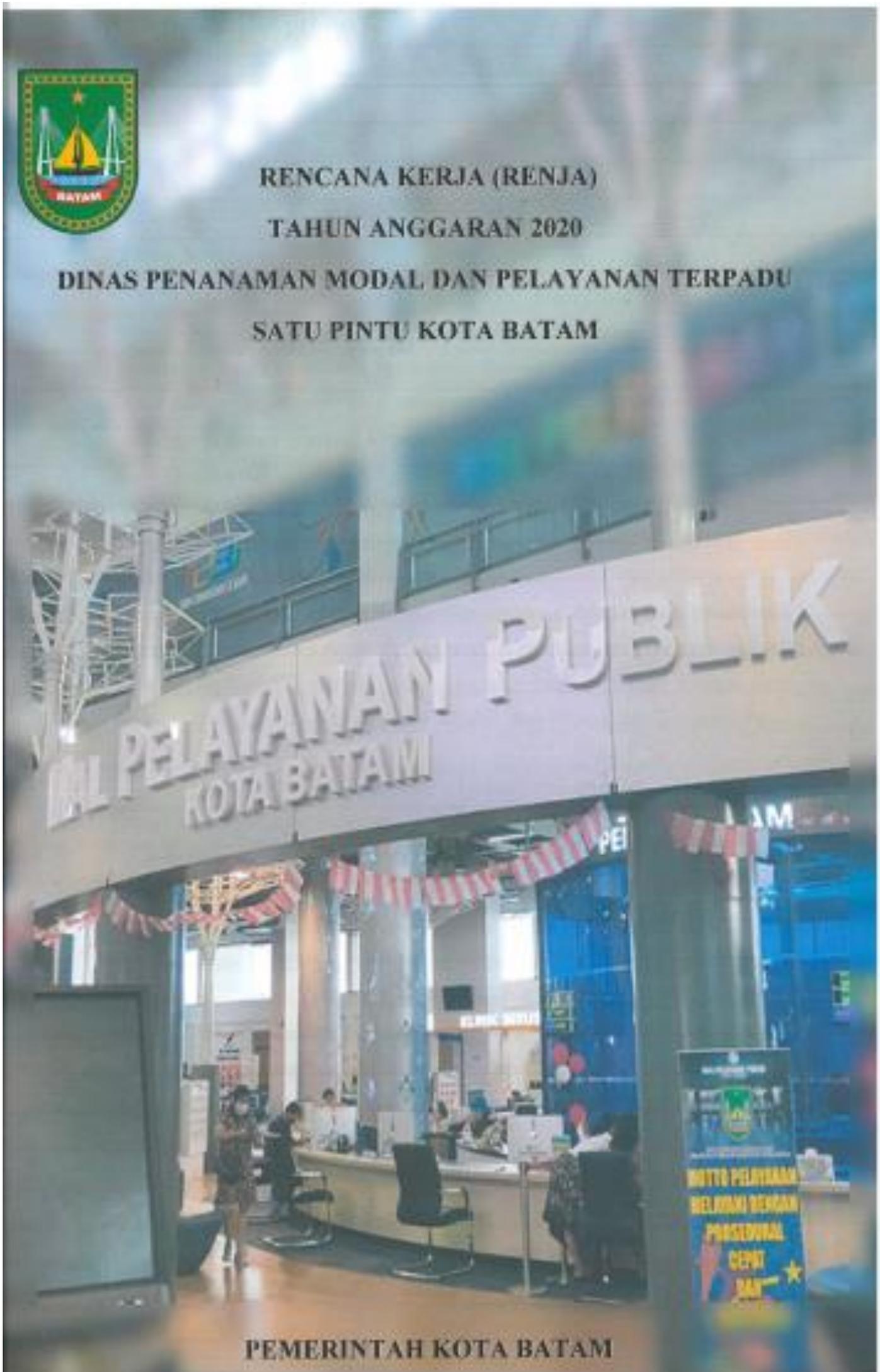




**RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA BATAM**



**PEMERINTAH KOTA BATAM**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam. DPM-PTSP Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan membawahi Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang.

Sesuai Peraturan Daerah tersebut kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Batam.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 56 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam adalah sebagai berikut: Merumuskan, Membina, Mengendalikan, Mengkoordinasikan dan Mempertanggungjawabkan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam mempunyai Fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis di Bidang Promosi, Data dan Informasi, Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan, Bidang Perizinan Ekonomi Sosial, Bidang Perizinan Pembangunan dan Lingkungan hidup;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Promosi, Data dan Informasi, Bidang Pengawasan,

Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan, Bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial, Bidang Perizinan Pembangunan Lingkungan dan hidup.

3. pembinaan dan pelaksanaan dibidang Promosi, Data dan Informasi, Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan, Bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial, Bidang Perizinan Pembangunan Lingkungan dan hidup.
4. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam terdiri dari :

- Sekretariat / Sekretaris (terdiri dari subbag. Program, subbag. Keuangan dan subbag. Umum dan Kepegawaian ).
- Bidang Promosi, Data dan Informasi Investasiterdiri dari subbid. Promosi, subbid. Data Investasi dan subbid. Informasi Investasi).
- Bidang Pengawasan, pengendalian dan Pengaduan penanaman modal dan perizinan, (terdiri dari Kasi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Kasi Pengaduan, Fasilitas dan Advokasi, dan Kasi Pengawasan dan pengendalian Perizinan).
- Bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial (terdiri dari Kasi Perizinan Sosial, Kasi Perizinan Ekonomi dan Kasi Perizinan Penanaman Modal).
- Bidang Perizinan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Utilitas (terdiri dari Kasi Perizinan Pembangunan, Kasi Perizinan Lingkungan Hidup dan Kasi Perizinan Utilitas).
- Bidang Promosi, Data dan Informasi (terdiri dari Kasi Promosi, Kasi Data Penanaman Modal dan Kasi Informasi Penanaman Modal);

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar kebijakan yang di gunakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Perwako Batam Nomor 56 tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Perwako Batam Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2020;

13. Surat Edaran Walikota Batam Nomor 109/SE/I/2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2019, tanggal 18 Januari 2018.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Tahun 2020 ini dibuat sebagai tindak lanjut terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Sistematis penulisan penyusunan Rencana awal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2020, merupakan penjabaran terhadap pencapaian Target Indikator Tahun 2020 yang tercantum dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2020.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (*Critical Success Factors*) untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan, maka terlebih dahulu perlu dianalisa sampai seberapa jauh misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern organisasi. Dengan mengetahui pengaruh intern dan ekstern organisasi, maka untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong dan ditumbuh kembangkan faktor-faktor yang memberi kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) guna dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan organisasi.

Sebaliknya faktor-faktor yang menghambat organisasi seperti kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*) dapat diantisipasi dan diatasi sejak dini agar tidak berpengaruh negatif terhadap upaya mencapai tujuan organisasi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam mempergunakan Analisa *SWOT* berhasil

merumuskan dan menganalisa lingkungan Internal (*ALI*) dan menganalisa Lingkungan Eksternal (*ALE*) yaitu sebagai berikut :

- ✓ Peraturan Daerah No.10/2016 tentang Susunan dan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah:
- ✓ Perwako Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja OPD dan perwako Batam nomor 56 tahun 2016 tentang Tupoksi.

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam yang PNS per Juni 2019 berjumlah 38 Orang sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut;

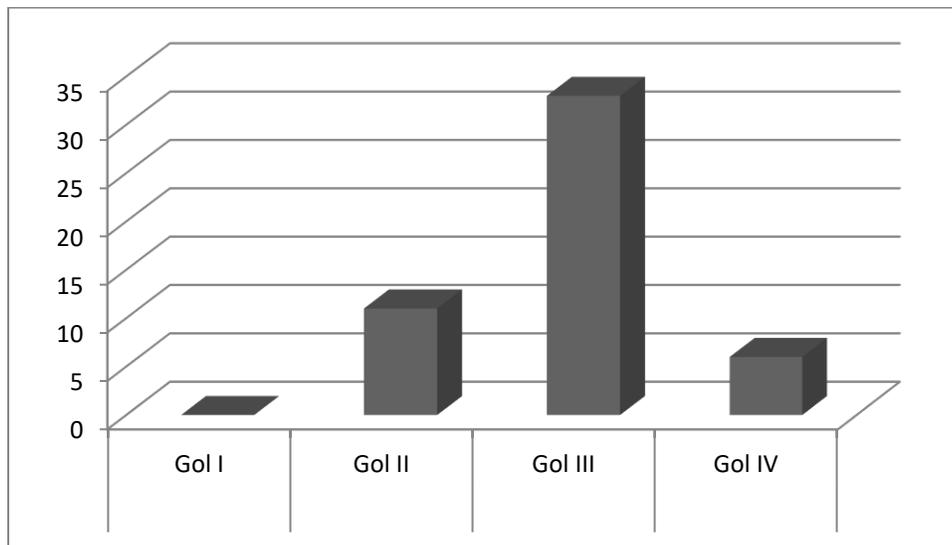
KONDISI PEGAWAI MENURUT TINGKAT STRATA PENDIDIKAN  
TABEL. 1.

No.	Penempatan	Menurut Pendidikan					Jumlah
		SMU	D3	S1	S2	S3	
1.	Kepala	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretariat	1	3	6	1	-	11
3.	Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi	-	1	2	2	-	5
4.	Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal Dan Perizinan	-	1	7	-	-	8
5.	Bidang Perizinan Sosial dan Ekonomi	-	-	5	2	-	7
6.	Bidang Perizinan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Utilitas	1	-	3	2	-	6
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>38</b>

KONDISI PEGAWAI MENURUT GOLONGAN  
TABEL. 2.

No.	PENEMPATAN	Menurut Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala	-	-	-	1	1
2.	Sekretariat	-	3	7	1	11
3.	Bidang Promosi, Data dan Informasi	-	-	4	1	5
4.	Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal Dan Perizinan.	-	1	6	1	8
5.	Bidang Perizinan Sosial dan Ekonomi	-	-	7	-	7
6.	Bidang Perizinan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Utilitas	-	1	5	-	6
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>38</b>

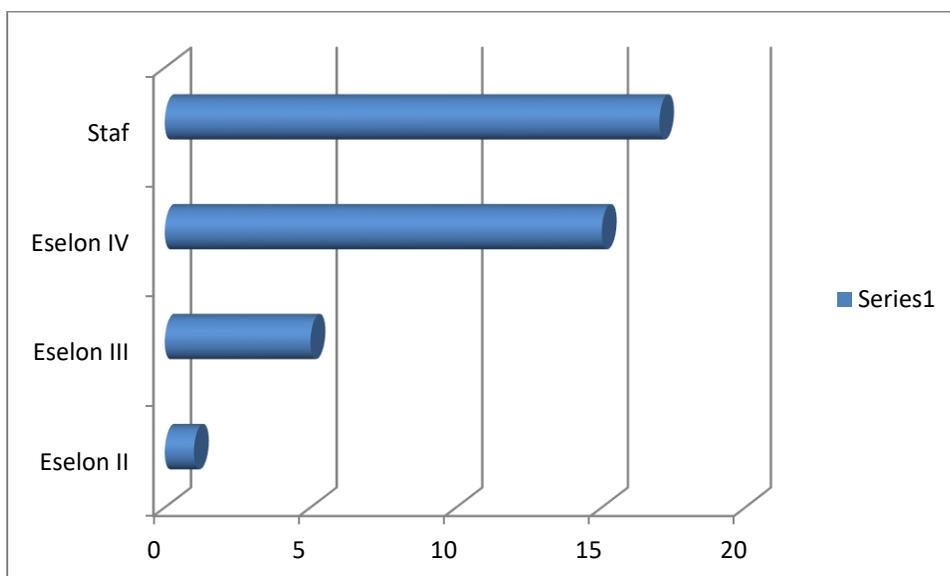
JUMLAH PEGAWAI MENURUT GOLONGAN  
GAMBAR. 1.



KONDISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN DAN JABATAN  
TABEL. 3

No.	PENEMPATAN	ESELON DAN STAF				Jumlah
		II	III	IV	STAF PNS	
1.	Kepala	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	3	7	11
3.	Bidang Promosi, Data dan Informasi	-	1	3	1	5
4.	Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal Dan Perizinan.	-	1	3	4	8
5.	Bidang Perizinan Sosial dan Ekonomi	-	1	3	3	7
6.	Bidang Perizinan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Utilitas	-	1	3	2	6
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>38</b>

Pegawai Negeri Sipil Menurut Eselon dan Staf  
KONDISI PEGAWAI BERDASARKAN ESELON  
GAMBAR. 2.



#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;

#### **RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DPMPSTP TAHUN ANGGARAN 2019**

- BAB I      PENDAHULUAN
  - 1.1. latar Belakang
  - 1.2. Landasan Hukum
  - 1.3. Maksud dan Tujuan
  - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II     EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II  
TAHUN BERKENAAN
  - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat  
Daerah Tahun 2019 dan Capaian Rencana  
Strategis Perangkat Daerah
  - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi  
Perangkat Daerah
  - 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
  - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan  
Masyarakat
- BAB III    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPSTP
  - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat  
Daerah
  - 3.3. Program dan Kegiatan
- BAB IV    PENUTUP

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja DPMPTSP Kota Batam TA. 2018 melaksanakan 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 6.806.073.160 (enam milyar delapan ratus enam juta tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah). Hasil pelaksanaan bidang urusan penanaman modal diarahkan dalam upaya peningkatan investasi dan kerjasama pembangunan di Kota Batam, antara lain :

1. Tersedianya administrasi perkantoran untuk operasional DPMPTSP dan Mal Pelayanan Publik Kota Batam selama 1 (satu) tahun anggaran terdiri dari honorarium pegawai kontrak, ATK, alat listrik dan alat elektronik pakai habis, materai, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, BBM, rekening telepon, rekening listrik rekening air, langganan surat kabar, langganan internet, premi asuransi kesehatan pegawai kontrak, pencetakan dan penjilidan, perjalanan dinas, pajak dan retribusi daerah. Hasil pelaksanaan output diatas guna meningkatkan kinerja pelayanan aparatur;
2. Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari perawatan kendaraan bermotor roda 4 (2 unit), pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, serapan anggaran kegiatan sebesar 88.99% dikarenakan adanya efisiensi anggaran dari sisa kontrak paket pekerjaan. Hasil dari output kegiatan meningkatnya kinerja pelayanan aparatur melalui ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan realisasi target capaian 50%. Realisasi capaian hanya 50% disebabkan adanya rasionalisasi anggaran secara umum pada kegiatan ini.
3. Terlaksananya promosi penanaman modal Kota Batam, dilaksanakan 1 (satu) kali di Batam dalam event ...
4. Penyelenggaraan perizinan Bid. Pembangunan, lingkungan hidup dan utilitas dengan output kegiatan cetak form perizinan

Sasaran yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan TA. 2019 sebagaimana tertuang pada dokumen Penetapan Kinerja OPD Tahun 2019 adalah :

*Sasaran 1 : Meningkatnya realisasi investas* dengan indikator kinerja Realisasi Nilai Investasi target sebesar Rp. 275.305.620.585 dan telah tercapai sebesar Rp. 2.029.781Jt per Juni 2019 sehingga capaian kinerja pada sasaran ini telah tercapai 100%. DPMPTSP Kota Batam masih dapat meningkatkan target indikator kinerja pada sasaran 1 dan akan dituangkan pada perubahan penetapan kinerja tahun 2019.

*Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan* dengan indikator kinerja yaitu (1) Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan target 1300 perizinan/non perizinan dan telah tercapai sejumlah .... Izin. (2) Persentase waktu penyelesaian perizinan sesuai SOP target 90%, pada indikator ini masih memerlukan rekapitulasi izin yang telah diterbitkan periode januari s/d juni 2019.

Selanjutnya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang ada dalam Renja Perangkat Daerah tahun 2019 sampai triwulan ke 2 dapat dilihat sebagai pada tabel T-C.29 di halaman berikut :

## REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2020

Tabel 4.

Tabel T-C.29

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM

Kode Rekening	Urusan /Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-3)			Target Program Kegiatan ( Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 )	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan ( Tahun n-1) 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan</b>	<b>- Persentase Realisasi Investasi</b>	659.419.480.054	663.356.000.000	225.660.344.742	433.935.200.000	100	275.305.620.585	1.372.596.820.585	208.15
1	Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya penyebaran informasi investasi daerah di dalam negeri (Output: Terselenggaranya promosi potensi daerah)	15 Kali	2 Kali	3 Kali	1 Kali	33%	4 Kali	7 Kali	46.67
2	Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Bid.Pembangunan, Lingkungan Hidup dan Utilitas	Terlaksananya operasional pelayanan publik ( Output: Terlaksananya pelayanan perizinan bidang lingkungan hidup dn utilitas)	2000 Izin	12,608 Izin	11,300 Izin	10,325 Izin	91%	530 Izin	24,233	1,212
3	Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Pembangunan Bid. Ekonomi dan Sosial	Menyelenggara kan perizinan ekonomi sosial (Output: Terlaksananya pelayanan perizinan bidang ekonomi dan sosial	1200 Izin	9000 Izin	Izin	8780 Izin	98%	1.300 Izin	18,780	1,565

Tabel T-C.29

Kode Rekening	Urusan /Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-3)			Target Program Kegiatan ( Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2019 )	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan ( Tahun n-1) 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
II	<b>Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>-Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tupoksi</b>	100% Per Tahun	100% Per Tahun	100% Per Tahun	100% Per Tahun	100%	100% Per Tahun	300%	300
	1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Output : Tersedianya sarana administrasi perkantoran)	100% Per Tahun	100% Per Tahun	100% Per Tahun	100% Per Tahun	100% Per Tahun	100% Per Tahun	300%	300
III	<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur</b>	<b>Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pemerintahan</b>	100% Per Tahun	100% Per Tahun	100% Per Tahun	50%	50%	50%	200%	200
	1 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur (Output : Sarana dan prasarana aparatur yang tersedia)	100%	100%	100%	50%	50%	50%	200%	200

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rencana kerja DPMPTSP Tahun 2019 telah dilaksanakan sebagaimana dokumen Renja sebelumnya, sehingga perubahan rencana kerja hanya pada pengurangan anggaran yang berasal dari sisa paket pekerjaan yang telah dilaksanakan dan perubahan target indikator kinerja dari kedua sasaran OPD oleh karena target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya pada dokumen Renja maupun Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2019 dapat tercapai pada semester 1 tahun berjalan. Untuk itu perubahan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Batam Tahun 2019 fokus pada perubahan target indikator kinerja.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Batam sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar melaksanakan urusan penanaman modal. Oleh karena itu dalam Perwako Batam Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tugas fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis urusan penanaman modal;
- b. Menyelenggarakan promosi penanaman modal;
- c. Melaksanakan pembinaan penanaman modal dan;
- d. Monitoring, evaluasi pelaksanaan penanaman modal

Penanaman modal/investasi di Kota Batam tahun 2018 sebanyak 145 investasi senilai 318.149.8Jt, dilihat dari nilai yang diinvestasikan menurun dari di tahun 2017 sebanyak 61 investasi dengan nilai 663.356Jt dan di tahun 2016 tercatat 29 investasi senilai 815.971.3Jt. Tahun 2019 sampai bulan Juni 2019 tercatat sebanyak 205 investasi dengan nilai 2.029.781Jt dan serapan tenaga kerja sebanyak ... Pertumbuhan ekonomi di Kota Batam sangat dipengaruhi oleh penanaman modal yang terealisasi.

Menurut jenisnya realisasi investasi kebanyakan berasal dari sektor perdagangan dan reparasi sesuai dengan kondisi Kota Batam yang dikhususkan sebagai kota industri dan investasi. Berikut realisasi investasi kurun waktu 4 (empat) terakhir.

#### Realisasi Investasi PMDN 2015-2018\*

Tabel 4.

Tahun	Proyek		Investasi (Rp. Juta)		Tenaga Kerja	
	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
2015	33	20	1.441.211	319.925.50	1728	1.171
2016	34	29	165.411	815.971.3	1354	1.575
2017	86	61	1.781.979.8	663.356	15.425	3.656
2018	62	38	1.067.372.6	436.435.2	3.251	1.679
Total	215	148	4.455.974	2.235.688	21.758	8.081

Sumber : Bidang Promosi Datin

Sedangkan data realisasi investasi penanaman modal asing di Kota Batam sejak tahun 2015 s/d 2018 hanya mencapai 6.97% sebagaimana table di bawah ini :

#### Realisasi Investasi PMA 2015-2018\*

Tabel 4.

Tahun	Proyek		Investasi (US\$.Ribu)		Tenaga Kerja	
	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
2015	178	65	23.219.774.6	326.109	19.587	4.684
2016	146	71	5.167.386.1	462.844.5	11.750	4.571
2017	151	74	411.809.8	1.116.807.1	11.231	6.830
2018	73	41	305.700.8	124.281.5	6.057	2.537
Total	548	251	29.104.671.3	2.030.042	48.625	18.622

Sumber : Bidang Promosi Datin

Penyelenggaraan pelayanan publik layanan 53 jenis perizinan dan non perizinan di tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana diamanahkan dalam Permendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, bahwa kegiatan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya

mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu dan satu tempat, dimana ada pelimpahan kewenangan dari pejabat pemerintahan yang lebih tinggi (pemberi delegasi) ke pejabat yang lebih rendah (penerima delegasi). Selain melayani masyarakat yang langsung datang ke lokasi PTSP guna mendaftarkan izin usaha, masyarakat juga dapat melakukan pendaftaran perizinan dan non perizinan melalui aplikasi OSS dari tempat tinggal maupun tempat usaha. Penyelenggara OSS yang adalah lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sistem OSS ini sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh izin usaha dan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing.

Dari analisis kinerja pelayanan DPMPTSP Kota Batam dapat disimpulkan bahwa keberadaan Dinas adalah untuk membantu Kepala Daerah mewujudkan Misi 1 (Pertama) dan Misi 4 (Empat) RPJMD Kota Batam periode 2016-2021, maka DPMPTSP Kota Batam menetapkan Indikator Kinerja guna mengukur capaian sasaran strategis yang akan dicapai untuk 1 (satu) tahun berjalan dan 5 (lima) tahun kedepan. Selanjutnya pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP Kota Batam sampai tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel T-C.30 di halaman berikutnya.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  
Tabel. 5.

Tabel T-C.30

No.	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	2018	2019 (per juni)	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	12	13
1	Realisasi Investasi		Realisasi Investasi	Rp225,660,344,742	Rp275,305,620,585	Rp 2,5 T	Rp 3 T	100%	Rp2,029,781,000,000	Rp 2.5T	Rp 3 T	-
			Persentase Penanaman Modal Yang Menyampaikan LKPM Secara Reguler	5% (108 PM)	5%	5%	5%	100% (108pm)		5%	5%	
2	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan		Izin Usaha yang Diterbitkan	11,300 Izin	1,830 Izin	100%	100%	10,080 Izin (89%)	1435 Izin	100%	100%	
3	Persentase Waktu Penyelesaian Perizinan Sesuai SOP		Menurunnya Persentase Aduan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan	N/A	-10%	-10%	-10%	+102,5% (41 aduan)	28% (10 Aduan)	-10%	-10%	
			Persentase Jenis Perizinan dan Non Perizinan Yang Sudah online	50% (36 Jenis)	93% (41 Jenis)	100%	100%	100%	93% (41 Jenis)	100%	100%	
			Indeks kepuasan Masyarakat	(B)Baik	(B)Baik	(A)Sangat Baik	(A)Sangat Baik	(B)Baik		(A)Sangat Baik	(A)Sangat Baik	

## Lanjutan Tabel T-C.30

No.	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	2018	2019 (per mei)	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan layanan administrasi perkantoran			100%	100% per tahun	100% per tahun	100% per tahun	100%	100% per tahun	100% per tahun	100% per tahun	-
	Cakupan sarana dan prasarana aparatur			100%	100% per tahun	100% per tahun	100% per tahun	50%	50% per tahun	100% per tahun	100% per tahun	-

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Kota Batam sebagai salah satu daerah yang termasuk dalam Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Dimana pengelolaan Pulau Batam, Rempang dan Galang diserahkan kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam. Konsekuensi dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2011 ini adalah hak pengelolaan atas tanah diberikan wewenangnya kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Pemerintah Daerah Kota Batam dalam hal melaksanakan penanaman modal/investasi lebih kepada usaha menciptakan dan menjaga iklim investasi yang berdaya saing, sehingga isu-isu strategis urusan penanaman modal di Kota Batam dapat dicermati sebagai berikut :

- a. Ketepatan waktu perizinan;
- b. Kepastian dan ketepatan biaya perizinan;
- c. Peraturan dan kebijakan tentang penanaman modal;
- d. Data aktual arah investasi;
- e. Promosi penanaman modal;
- f. Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- g. Kerjasama investasi G2G dan G2B;
- h. Pengawasan dan Pengendalian terhadap penanaman modal.

Kemudahan layanan perizinan secara elektronik dan selesai dalam satu pintu diyakini akan menambah jumlah investasi di Kota Batam. Yang merupakan bagian paling penting dan menentukan daya tarik daerah sebagai tujuan investasi. Oleh karena itu keberadaan PTSP menjadi salah satu penentu minat investor dalam menentukan tujuan investasi dimana kemudahan layanan perizinan menunjukkan adanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, cepat dan efektif, selain itu memberikan

jaminan kepada para investor dan masyarakat akan kepastian hukum dalam memperoleh layanan perizinan dan berinvestasi serta hak masyarakat mendapatkan pelayanan prima.

#### **2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 DPMPTSP Kota Batam diusulkan dengan anggaran Rp. 9.498.456.394.81 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra. Usulan anggaran diarahkan untuk mencapai Sasaran (1) Meningkatnya realisasi penanaman modal dan perlindungan investasi dengan anggaran sebesar Rp. 3.468.138.394.81 dan anggaran untuk mencapai sasaran (2) Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan sebesar Rp. 6.030.318.000. Kedua sasaran terdiri dari 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- Tujuan OPD : Terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi dengan pelayanan prima, dengan 2 sasaran yaitu :
  1. Meningkatnya realisasi penanaman modal dan perlindungan investasi, dengan indikator kinerja :
    - Realisasi investasi;
    - Persentase penanaman modal yang menyampaikan LKPM secara regular;
    - Menurunnya persentase aduan masyarakat terhadap layanan perizinan.
  2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, dengan indicator kinerja :
    - Persentase penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP;
    - Indeks kepuasan masyarakat (IKM).

Rincian program, kegiatan dan indikator kinerja terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat lebih jelas dalam table T-C. 31 di bawah ini :

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020  
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

No.	RANCANGAN AWAL RKPD 2020					ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan</b>		<b>Realisasi investasi; Persentase penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP</b>	<b>Rp 2.5 T; 90%</b>	<b>7.401.096.880</b>	<b>Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan</b>		<b>Realisasi investasi; Persentase penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP</b>	<b>Rp.2.5 T 90%</b>	<b>6.259.978.000</b>	
1	Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Batam	Jumlah minat penanaman modal	50 pengunjung	127.984.000	Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Batam	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	200 penanaman modal	116.760.000	
2	Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Bid. Pembangunan, Lingkungan Hidup dan Utilitas	Batam	Persentase penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP perizinan Bid. Pembangunan dan Lingkungan Hidup	90%	104.600.000	Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Bid. Pembangunan, Lingkungan Hidup dan Utilitas	Batam	Persentase penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP perizinan Bid. Pembangunan dan Lingkungan Hidup	90%	53.800.000	
3	Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Bid. Ekonomi dan Sosial	Batam	Persentase penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP perizinan Bid. Ekonomi dan Sosial	90%	7.563.429.520	Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Bid. Ekonomi dan Sosial	Batam	Persentase waktu penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP perizinan Bid. Ekonomi dan Sosial	90%	57.056.000	
4	Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal	Batam	Persentase Penanaman Modal yang menyampaikan LKPM secara periodik	5%	100.000.000	Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal	Batam	Persentase Penanaman Modal yang menyampaikan LKPM secara periodik	5%	72.900.000	
5	Kegiatan Operasional Mal Pelayanan Publik	Batam	IKM	Indeks A (82.26-100)	7.563.429.520	Kegiatan Operasional Mal Pelayanan Publik	Batam	IKM	Indeks A (82.26-100)	5.919.462.000	
6	Kegiatan Pemutahiran Data	Batam	Jumlah publikasi data investasi	1 kali	60.000.000	Kegiatan Pemutahiran Data	Batam	Jumlah publikasi data investasi terkini	12 kali	40.000.000	

Investasi		terkini			Investasi				
-----------	--	---------	--	--	-----------	--	--	--	--

Lanjutan Tabel T-C.31

No.	RANCANGAN AWAL RKPDP 2020					ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	<b>Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>100% per tahun</b>	<b>3.390.175.240</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>100% per tahun</b>	<b>3.046.365.834.34</b>	
1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Batam		100%	3.390.175.240	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Batam		100%	3.046.365.834.34	
I	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Meningkatnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>244.704.360</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Meningkatnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>192.112.560.47</b>	
1	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Batam	Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur	100%	108.175.000	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Batam	Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur	100%	14.000.000	
2	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Batam	Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur	100%	219.426.360	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Batam	Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur	100%	178.112.560.47	

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses usulan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam diusulkan melalui Rancangan Awal RKPD kepada Sekretaris Daerah Kota Batam oleh Kepala OPD yang kemudian dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan atas usulan rancangan awal Dinas.

Selanjutnya rancangan awal Renjaj Perangkat Daerah disempurnakan dengan mengacu pada hasil forum perangkat daerah yang menghasilkan rancangan awal Renja PD yang telah disempurnakan dan rancangan awal Renja DPMPTSP Kota Batam diserahkan kepada Bappelitbangda Kota Batam untuk diverifikasi.

Ranwal Renja PD yang telah disempurnakan berdasarkan saran dan pertimbangan forum PD merupakan proses penyempurnaan Panwal Renja PD berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Kemudian Rancangan Renja PD dibahas dan disempurnakan dalam forum PD disajikan dengan sistematika sesuai Pasal 129 untuk diserahkan ke Bappelitbangda Kota Batam guna verifikasi setelah itu dapat disempurnakan dan diperbaiki sesuai hasil verifikasi.

Proses penyempurnaan Rancangan Renja PD menjadi Rancangan Akhir PD berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD. Penyusunan dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam peraturan walikota tentang RKPD dan diverifikasi kembali oleh Bappelitbangda Kota Batam dan ditetapkan sebagai Renja PD setelah RKPD Kota Batam ditetapkan melalui peraturan walikota.

Melalui proses di atas DPMPTSP Kota Batam tidak memiliki usulan program/kegiatan yang berasal dari masyarakat melalui pelaksanaan musrenbang mulai tingkat kelurahan,

kecamatan maupun kota akan tetapi program dan kegiatan yang diusulkan oleh DPMPTSP Kota Batam sesuai dengan tugas fungsi PD dan Rencana Strategis Dinas dalam mengemban Misi 4 (empat) yang ada di dalam RPJMD Kota Batam periode 2016-2021.

Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota tidak memiliki usulan program dan kegiatan yang berasal dari usulan masyarakat melalui mekanisme pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) baik tingkat kelurahan, kecamatan maupun kota dan forum OPD. Meski demikian DPMPTSP Kota Batam sesuai tugas fungsinya didalam melaksanakan pelayanan publik berupaya meningkatkan kualitas pelayanan terpadu satu pintu dengan memberikan layanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah dan terjangkau oleh masyarakat dengan cara proses layanan perizinan dilakukan secara elektronik. Adapun tabel usulan program dan kegiatan masyarakat sebagai berikut :

Tabel 6.  
Daftar Usulan Masyarakat

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
2	3	4	5	6
N I H I L				

**BAB III****TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Untuk menyelaraskan rencanan kerja program dan kegiatan DPMPTSP Kota Batam Tahun 2020 terhadap program nasional, maka dalam penyusunan Renja ini perlu mendukung program nasional guna mensukseskan capaian sasaran baik di daerah maupun pusat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 6.

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran pada Renstra OPD Kabupaten/Kota	Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi	Capaian Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Realisasi Investasi	Meningkatnya realisasi penanaman modal dan perlindungan investasi	Meningkatnya realisasi investasi	Meningkatkannya realisasi penanaman modal nasional yang berorientasi pada kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan penanaman modal
2.	Persentase Penanaman Modal yang menyampaikan LKPM secara reguler		Terwujudnya minat kerjasama penanaman modal	Meningkatnya minat penanaman modal melalui efektivitas kegiatan promosi yang tepat sasaran
3.	Menurunnya persentase aduan masyarakat terhadap layanan perizinan			
4.	Persentase penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan		Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang penanaman modal
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat			

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang tertuang di dalam Renstra DPMPTSP Kota Batam yang adalah terjemahan dari visi dan misi Kepala Daerah (Walikota) RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021, maka DPMPTSP Kota Batam menetapkan tujuan, sasaran dan indikator Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 7.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi dengan pelayanan prima	Meningkatnya realisasi penanaman modal dan perlindungan investasi	Realisasi Investasi
		Persentase Penanaman Modal yang menyampaikan LKPM secara reguler
		Menurunnya persentase aduan masyarakat terhadap layanan perizinan
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP
Indeks Kepuasan Masyarakat		

Fungsi dari tujuan dan sasaran OPD adalah guna mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan terlaksana sesuai dengan arah pembangunan daerah yang ditetapkan. Sedangkan indikator kinerja bertujuan untuk mengukur capaian terhadap sasaran OPD. Sehingga pelaksanaan program dan kegiatan merupakan rangkaian dari pelaksanaan pembangunan daerah Kota Batam yang tepat dan berkesinambungan hingga 5 (lima) tahun ke depan.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan DPMPTSP di Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

- Rendahnya daya saing investasi daerah;

- Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang profesional, transparan, mudah dan cepat;
- Sumber daya aparatur yang memahami tugas fungsi;
- Sarana dan prasarana yang memadai.

Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang dianggarkan pada penyampaian KUA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 9.450.518.630 dan penetapan KUA TA. 2020 sebesar Rp. 9.498.456.394.81 untuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan yakni :

- I. Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan, yang terdiri dari 3 kegiatan yaitu :
  1. Kegiatan Promosi Penanaman Modal, sebesar Rp. 116.760.000;
  2. Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Bid. Pembangunan Lingkungan Hidup dan Utilitas, sebesar Rp. 53.800.000;
  3. Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Bid. Pembangunan Ekonomi dan Sosial, sebesar Rp. 57.056.000;
  4. Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal, sebesar Rp. 72.900.000;
  5. Kegiatan Operasional Mal Pelayanan Publik, sebesar Rp. 5.919.462.000;
  6. Kegiatan Pemutahiran Data, sebesar Rp. 40.000.000.
- II. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 1 (satu) kegiatan :
  1. Kegiatan Peningkatan Administrasi Perkantoran, sebesar Rp. 3.046.365.834.34
- III. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 1 (satu) kegiatan :
  1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 14.000.000;
  2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, sebesar Rp. 178.112.560.47

Selanjutnya rumusan program dan kegiatan telah sesuai dengan rancangan awal RKPD, sehingga perubahan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Batam meski pada penyampaian KUA untuk anggaran sewa gedung Mal Pelayanan Publik dipindahkan di kegiatan Peningkatan Administrasi Pelayanan Perkantoran, namun pada penetapan KUA anggaran tersebut alokasinya dikembalikan ke kegiatan Operasional Mal Pelayanan Publik oleh karena tidak sesuai dengan dokumen RKPD, sehingga perbedaan ini tidak mempengaruhi antara rencana target kinerja dan target capaian kinerja secara signifikan sebagaimana pada table T-C.33 di bawah ini.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Tabel 7.

Tabel T-C.33

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Perubahan Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					APBD II	APBD I	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.02.12.1.02.12.01.15.</b>	<b>Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan</b>		<b>Realisasi investasi</b>	<b>Rp 2.5 T</b>	<b>6.259.978.000</b>				<b>Rp 3 T</b>	<b>9.107.600.000</b>
1.02.12.02.12.01.15.01.	Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Skala Nasional	Jumlah minat penanaman modal	200 Penanaman modal	116.760.000	-	-		600 Penanaman Modal	500.000.000
1.02.12.1.02.12.01.15.04.	Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Bid. Pembangunan Lingkungan Hidup dan Utilitas	Batam	Persentase penyelesaian sesuai waktu SOP perizinan bid. Pembangunan dan lingkungan hidup	90 %	53.800.000	-	-		90%	104.500.000
1.02.012.1.02.12.01.15.05.	Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Bid. Ekonomi dan Sosial	Batam	Persentase penyelesaian sesuai waktu SOP perizinan Bid. Ekonomi dan Sosial	90%	57.056.000	-	-		90%	550.000.000

Lanjutan Tabel T-C.33

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					APBD II	APBD I	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.02.12.1.02.12.01.15.</b>	<b>Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan</b>		<b>Persentase penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP</b>	<b>90%</b>	<b>6.259.978.000</b>				<b>90%</b>	<b>9.107.600.000</b>
	Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal	Batam	Persentase Penanaman modal yang menyampaikan LKPM secara periodik	5%	72.900.000	-	-		5%	150.000.000
	Kegiatan Operasional Mal Pelayanan Publik	Batam	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Indeks A (82.26- 100)	5.919.462.000	-	-		Indeks A (82.26- 100)	7.563.000.000
	Kegiatan Pemutakhiran Data Investasi	Batam	Jumlah publikasi data investasi terkini	12 kali	40.000.000	-	-		12 kali	240.000.000
<b>1.02.1.02.12.01.01.</b>	<b>Program Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD</b>	<b>100% per tahun</b>	<b>3.046.365.834.34</b>	-	-		<b>100 per tahun</b>	<b>3.500.000.000</b>

Lanjutan Tabel T-C.33

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Perubahan Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					APBD II	APBD I	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.1.02.12.01.01.01.	Kegiatan Peningkatan Administrasi Perkantoran	Batam	Meningkatnya Kinerja dan pelayanan aparatur	100%	3.046.365.834.34	-	-		100%	3.500.000.000
<b>1.02.1.02.12.01.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Batam</b>	<b>Meningkatnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>50 %</b>	<b>192.112.560.47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>100%</b>	<b>330.000.000</b>
1.02.1.02.12.01.02.01.	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Batam	Meningkatnya Kinerja dan pelayanan aparatur	100%	14.000.000	-	-		100%	110.000.000
	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Batam	Meningkatnya Kinerja dan pelayanan aparatur	100%	178.112.560.47	-	-		100%	220.000.000

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD**

Rencana Kerja (Renja) dan Pendanaan DPMPTSP Kota Batam Tahun Anggaran 2020 telah diinput ke dalam aplikasi *e-planning* Pemerintah Kota Batam, oleh karena untuk dapat menjadi pembanding antara Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dan Rencana Kerja (Renja) pada aplikasi *e-planning* dapat dilihat pada lampiran hasil cetakan aplikasi *e-planning*.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan perencanaan pembangunan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun Anggaran 2020. Sebagaimana disebut dengan Rencana Kerja (Renja) diharapkan dokumen perencanaan tahunan ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun.

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di tahun sebelumnya yang bertujuan untuk mengetahui apakah target indikator kinerja dapat tercapai dan terlaksana dengan baik serta mengurai permasalahan atau kendala yang dihadapi sehingga rencana kerja (Renja) Tahun 2020 dapat terlaksana sesuai perencanaan dan memenuhi perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan oleh Kepala Dinas dan Walikota.

Renja Kerja (Renja) Tahun 2020 DPMPTSP Kota Batam juga disusun berdasarkan rumusan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD dan RPJMD Kota Batam 2016-2021, juga sesuai dengan perkembangan permasalahan pembangunan daerah agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai target indikator kinerja Dinas DPMPTSP tahun 2020 yakni realisasi investasi, persentase penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP, persentase penanaman modal yang menyampaikan LKPM secara reguler, dan indeks kepuasan masyarakat sesuai dengan target yang ditetapkan.

Ada 6 (enam) faktor penentu keberhasilan fokus penanaman modal di dalam dokumen RKPD Kota Batam Tahun 2020 yaitu :

- Meningkatkan promosi peluang investasi;
- Meningkatkan pelayanan perizinan secara terpadu;
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian;

Keenam faktor penentu keberhasilan fokus penanaman modal diatas telah tergambar didalam program, kegiatan dan anggaran DPMPTSP Kota Batam dalam Renja 2020 beserta target capaiannya.

Pada akhirnya dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2020, diharapkan dapat memberikan motivasi bagi Perangkat Daerah untuk mencapai target indikator kinerja Dinas dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah Kota Batam.

Batam, September 2019  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BATAM



FIRMANSYAH  
Pembina Utama Muda  
NIP.19680412 198909 1 002

Renja2020

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan rahmat-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam TA. 2020 dapat disusun sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah baik rencana tahunan RKPD maupun dokumen rencana jangka menengah lima tahunan (RPJMD) dan jangka panjang (RPJPD).

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan DPMPSTP Kota Batam Tahun 2020 harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 di dalam dokumen Renstra Dinas. Perubahan Renja juga harus mengacu pada pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan daerah dan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum pada Peraturan Walikota Batam Nomor 36 Tahun 2019 tentang RKPD Kota Batam Tahun 2020.

Renja PD merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen Renstra Dinas yang memuat sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja untuk dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya dan melaporkan realisasi capaian kinerja pada akhir tahun 2020.

Batam, September 2019  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BATAM

  
FIRMANSYAH  
Pembina Utama Muda  
NIP.19680412 198909 1 002